

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

LAMPIRAN: I.3 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD
TAHUN 2021**

No	Urusan	No	IKK Outcome	IKK Output	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset $\frac{2}{17} \times 100\%$ Jumlah seluruh koperasi	11,76%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.1		Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan (Belum ada koperasi usaha simpan pinjam Provinsi) $\frac{0}{1} \times 100\%$ Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan DPMPTSP
		1.2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan (Belum ada koperasi usaha simpan pinjam Provinsi) $\frac{0}{1} \times 100\%$ Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan DPMPTSP

		1.3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi $\frac{17}{17 \times 100\%}$ Jumlah koperasi yang ada	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (Belum ada koperasi usaha simpan pinjam Provinsi) $\frac{0}{1 \times 100\%}$ Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan $\frac{7}{17 \times 100\%}$ Jumlah koperasi yang ada	41,18 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian $\frac{21}{398 \times 100\%}$ Jumlah anggota koperasi yang ada	5,27%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.7		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Tidak ada koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan) $\frac{0}{17 \times 100\%}$ Jumlah koperasi yang ada	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.8		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya $\frac{1}{17 \times 100\%}$ Jumlah koperasi yang ada	13,77	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		1.9		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan (Belum ada koperasi Provinsi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan) $\frac{0}{17} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	3,84 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.10		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran karena kegiatan terkena refocusing untuk penanganan pencegahan Covid 19) $\frac{0}{17} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
,		1.11		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan $\frac{17}{17} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	100 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan (Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan) $\frac{0}{17} \times 100\%$ Jumlah koperasi yang ada	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha $\frac{226}{1.957} \times 100\%$ Jumlah usaha kecil keseluruhan	11,55 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.1		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru $\frac{21.211}{35.396} \times 100\%$ Jumlah wirausaha yang ada	59,92%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		2.2		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) <u>1.780</u> 1.957 X 100% Jumlah Usaha Kecil yang ada	90,9%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.3		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	Jumlah usaha kecil yang bermitra <u>54</u> 1.957 X 100% Jumlah usaha kecil yang ada	2,76 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.4		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi <u>524</u> 1.957 X 100% Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	26,78%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.5		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran <u>32</u> 1.957 X 100% Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	1,64 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.6		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan <u>317</u> 1.957 X 100% Jumlah usaha kecil yang ada	16,20 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2.7		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	(Tidak ada usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha) Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha <u>0</u> 1.957 X 100% Jumlah usaha kecil yang ada	0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi		<p>Jumlah industri besar tahun n – jumlah industry besar tahun n-1 (35 - 32) ----- x 100% 32 Jumlah industri besar tahun n-1</p>	9,38%	Dinas Perindustrian
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/6)%	81,15%	Dinas Perindustrian
		2.1		Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen BinaBangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%)</p>	100%	Dinas Perindustrian

		3	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (Data tidak tersedia) $\frac{0}{2} \times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Dinas Perindustrian
		3.1		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan $\frac{2}{2} \times 100\%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	100 %	Dinas Perindustrian
		4	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{0}{1} \times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan (Data Tidak Tersedia)	0 %	Dinas Perindustrian

		4.1		Persentase jumlah izin perluasan industri IPU) bagi industri besar yang diterbitkan	Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan $\frac{0}{1} \times 100\%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk (Tidak ada pengajuan rekomendasi izin)	0 %	Dinas Perindustrian
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\frac{0}{2} \times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan (Tidak ada pengajuan rekomendasi izin)	0 %	Dinas Perindustrian
		5.1		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Realisasi izin yang diterbitkan $\frac{2}{2} \times 100\%$ Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	100 %	Dinas Perindustrian

		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (Tidak Ada) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (Tidak Ada) - Informasi produksi dan kapasitas produksi (Tidak ada) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (Tidak Ada) - Informasi bahan bakar/ energy (Tidak Ada) - Informasi tenaga kerja (Tidak Ada) - Informasi investasi (Ada) 	1 Sub ada 6 Sub Tidak Ada	Dinas Perindustrian
		6.1		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	<p>Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SIINAS</p> $\frac{19}{35} \times 100\%$ <p>Total Populasi perusahaan industry besar dan perusahaan kawasan industry lintas kabupaten kota</p>	54,28%	Dinas Perindustrian
		7	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		<p>Jumlah industry kecil dan menengah tahun n – jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1</p> $\frac{4.230 - 3.672}{3.672} \times 100\%$ <p>umlah industry kecil dan menengah tahun n-1</p>	15,19 %	Dinas Perindustrian

30	Perdagangan	1	Mengukur Pertumbuhan nilai ekspor non migas		Nilai ekspor non migas tahun berjalan- nilai ekspor non migas tahun sebelumnya <u>1,764,049,050.9 - 1,018,295,540.0</u> <u>1,018,295,540.0</u> X 100 Nilai ekspor non tahun sebelumnya	73,24%	Dinas Perdagangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara
		1.1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi promosi dagang <u>2</u> 12 X 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang	16,66%	Dinas Perdagangan
		1.2		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk <u>8</u> 12 X 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang	66%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1.3		Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor <u>199</u> 3.244 X 100% Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	6,13 %	Dinas Perdagangan
		1.4		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru (Terdapat satu perusahaan yang menjadi eksportir baru namun bukan merupakan peserta pelatihan) <u>0</u> 1 X 100% Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan terkait ekspor	0%	Dinas Perdagangan